



Hk.04.01/310.

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR : KEP. 330/M.PPN/11/2005

TENTANG

**PENUNJUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA DALAM NEGOSIASI
RURAL INFRASTRUCTURE SUPPORT PROJECT (RISP)
DENGAN *ASIAN DEVELOPMENT BANK***

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tingkat daerah, Pemerintah perlu meningkatkan akses masyarakat terutama masyarakat yang berada di desa tertinggal terhadap infrastruktur pedesaan melalui penguatan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi – Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) yang tengah dilakukan oleh Pemerintah;
 - b. bahwa sumber pendanaan berasal dari pinjaman luar negeri masih dibutuhkan untuk mendukung peningkatan akses masyarakat desa terhadap infrastruktur, perbaikan dan rehabilitasi infrastruktur di pedesaan, serta peningkatan kinerja pelaksanaan proyek yang difokuskan melalui pemberdayaan masyarakat;
 - c. bahwa untuk mendapat pinjaman dana sebagaimana dimaksud huruf b. di atas diperlukan penunjukan delegasi Republik Indonesia untuk melakukan negosiasi dengan *Asian Development Bank*;
 - d. bahwa ...

- d. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi persyaratan yang diperlukan sesuai tugas dan fungsinya menjadi delegasi Republik Indonesia dalam negosiasi sebagaimana tersebut dalam huruf c di atas;

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagai mana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2004;
 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
 3. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Nomor KEP.031/KET/5/1995 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Memperhatikan: *Memorandum of Understanding* antara Pemerintah Republik Indonesia dan *Asian Development Bank Fact Finding Mission for Rural Infrastructure Support Project* tanggal 26 September 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS TENTANG PENUNJUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA DALAM NEGOSIASI *RURAL INFRASTRUCTURE SUPPORT PROJECT* (RISP) DENGAN *ASIAN DEVELOPMENT BANK*.**

PERTAMA ...

- PERTAMA** : Menunjuk delegasi Republik Indonesia untuk melakukan negosiasi RISF dengan *Asian Development Bank* pada tanggal 17-18 November 2005 di Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Delegasi Republik Indonesia berkewajiban untuk melaporkan hasil negosiasi RISF dengan *Asian Development Bank* kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum.
- KETIGA** : Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan negosiasi dengan *Asian Development Bank* tersebut di atas dibebankan kepada anggaran Departemen Pekerjaan Umum;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2005

 **MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,** 



DR. SRI MULYANI INDRAWATI

Tembusan Yth:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Pekerjaan Umum
3. Menteri Pengembangan Daerah Tertinggal
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/

KEPALA BAPPENAS

NOMOR : 330/M.PPN/11/2005

TANGGAL : 15 NOVEMBER 2005

SUSUNAN KEANGGOTAAN
DELEGASI REPUBLIK INDONESIA DALAM NEGOSIASI
RURAL INFRASTRUCTURE SUPPORT PROJECT
DENGAN *ASIAN DEVELOPMENT BANK*

A. TIM DELEGASI

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Agoes Widjanarko,
Dirjen Cipta Karya,
Departemen Pekerjaan Umum. | Sebagai
Ketua |
| 2. Imron Bulkin,
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,
Bappenas. | Sebagai
Wakil Ketua |
| 3. Mulia Nasution,
Dirjen Perbendaharaan,
Departemen Keuangan. | Sebagai
Anggota |
| 4. Achmad Rochjadi,
Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan,
Departemen Keuangan. | Sebagai
Anggota |
| 5. Lukita D. Tuwo,
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,
Bappenas. | Sebagai
Anggota |
| 6. Bambang Widianto,
Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM,
Bappenas. | Sebagai
Anggota |
| 7. Luky Eko Wuryanto,
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah,
Bappenas. | Sebagai
Anggota |

8. Tatag ...

- | | |
|---|--------------------|
| 8. Tatag Wiranto,
Deputi Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha,
Kementerian Negara Pengembangan Daerah Tertinggal. | Sebagai
Anggota |
| 9. Lucky Korah,
Deputi Bidang Infrastruktur,
Kementerian Negara Pengembangan Daerah Tertinggal. | Sebagai
Anggota |
| 10. Roestam Syarif,
Sekretaris Jenderal,
Departemen Pekerjaan Umum | Sebagai
Anggota |

B. TIM TEKNIS

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Djoko Murjanto,
Direktur Bina Program,
Departemen Pekerjaan Umum | Sebagai
Ketua |
| 2. Arifin Rudiyanto
Direktur Kewilayahan I,
Bappenas. | Sebagai
Wakil Ketua |
| 3. Donny Azdan,
Direktur Pengairan dan Irigasi,
Bappenas. | Sebagai
Anggota |
| 4. Umiyatun Hayati Triastuti,
Direktur Transportasi,
Bappenas. | Sebagai
Anggota |
| 5. Basah Hernowo,
Direktur Pemukiman dan Perumahan,
Bappenas. | Sebagai
Anggota |
| 6. Pungky Sumadi,
Direktur Penanggulangan Kemiskinan,
Bappenas. | Sebagai
Anggota |
| 7. Rahma Iryanti,
Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja,
Bappenas. | Sebagai
Anggota |

8. Delthy ...

- | | | |
|-----|--|--------------------|
| 8. | Delthy Simatupang
Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral,
Bappenas. | Sebagai
Anggota |
| 9. | Suprayoga Hadi,
Direktur Kewilayahan II,
Bappenas. | Sebagai
Anggota |
| 10. | RM Dewo Broto
Kepala Biro Hukum,
Bappenas. | Sebagai
Anggota |
| 12. | Dharma Bakti
Direktur Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
Direktur Jenderal Perbendaharaan | Sebagai
Anggota |
| 13. | Panani Kesai
Kepala Sub Direktorat Pemrograman dan Anggaran
Departemen Pekerjaan Umum | Sebagai
Anggota |
| 14. | Rina Agustin
Kepala Sub Direktorat Kerjasama Luar Negeri
Dan Pola Investasi
Departemen Pekerjaan Umum | Sebagai
Anggota |

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



DR. SRI MULYANI INDRAWATI